ISLAM KOMUNIKATIF BERBASIS INDONESIA
Studi Kritis Atas Gerakan Islam Inklusif dan Ekslusif di Indonesia

ACHMAD NUR

STAI NURUL HUDA
Kapongan, Situbondo

anur_fikr@yahoo.co.id

Abstract

Islam is the brand of a rule designed by God as a guide to mankind to live a life activities in the world. Therefore, dedicated to the man, then God as actively involved in the rule designer articulate his ideas with the phenomenon of human life. The statement above, show that Islam is primarily a study or the creation thinks creator who makes the product creation (humans) as an object of study. As a rule, of course, Islam must be understood, it is known, and is perceived by humans as targets.

Based on the concept map, this article comes as a form of innovation to the reality of religious Islamic studies in Indonesia. The main object to be studied is the study of contemporary Islam that is both inclusive and exclusive. Based on initial studies, two shades of the contemporary Islamic societies can exacerbate confusion even make people uneasy to understand and live the teachings of Islam. Inclusive Islamic concept formulated by thinkers above also does not provide a practical formulation of a map or a clear and easy to be done by all the people of Indonesia. Islamic concept which is maintained by a group of fanatic thinkers rather than resolve the problem over the nation even spawned a new problem with no regard for the humanity values of other religious groups.

When the reality as it is, the relevant question is how the formulation of the interaction patterns of diversity of Indonesian society that is privacy and the public with the feel of peace and beauty. To answer these questions will be used Habermas's discourse ethics -oriented pattern of communicative action and deliberative attitudes in the public space. Through this approach, would be born communicative faced

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Indonesian Islam is the application of Islamic values that can provide safety, tranquility and enlightenment for the people, other religions as well as providing benefits to the State. Indonesian Muslims remain critical of any form of state policy to not injure the value of the basic state. Indonesian Islamic able contrasted and plays two differents roles that religious communities and citizens. Indonesian Muslims have an obligation to maintain and oversee the State unitary republic of Indonesia as a form of inheritance carry out the mandate of the freedom fighters. Indonesian Islam no other religion diruang public position as a religion but as a minority partner in the realization of the value of the universality of God in the form of human safety.

Latar Belakang

Islam merupakan agama Tuhan yang disebarkan melalui proses interaksi dengan kebudayaan dan problem sosial masyarakat. Pada awalnya, Islam lahir di dunia Arab sebagai pijakan hidup masyarakat Arab dalam berprilaku. Oleh karena konteks sosial budayanya adalah masyarakat Arab maka nilai nilai Islam yang berbentuk aturan disesuaikan dengan kapasitas dan kondisi masyarakat Arab. Dari proses dialog inilah Islam berkembang dan besar menjadi agama manusia dari masa kemasa, Negara ke Negara, hingga nilai nilai Islam bisa dihirup dan dinikmati oleh bangsa hindia belanda yang pasca kemerdekaan disebut sebagai Indonesia.

Seiring dengan perkembangan pengetahuan yang menggerakkan ruh kebudayaan manusia, Islam di Indonesia juga bergerak mengikuti tradisi keilmuan yang berkembang. Islam pada mulanya masuk ke Nusantara pada abad 13 dengan semangat kebudayaan (*Tsaqofah*) dan tradisi (*Turats*) yang dibawa oleh para pedagang dari negeri Gujarat. Melalui semangat inilah Islam kemudian berkembang ke pulau Jawa dengan strategi dakwah yang adaptif terhadap kebutuhan dan kondisi sosial masyarakat Jawa. Atas dasar itulah Islam Indonesia pada awal penyebarannya masih satu warna yaitu Islam yang dipahami dan dibawa oleh para Wali Songo.

Dewasa ini, Islam Indonesia bukan lagi satu warna melainkan multi warna (warna-warni). Menurut amatan penulis, ada dua corak pemahaman keIslaman yang saat ini mewarnai bumi pertiwi yaitu inklusif kontekstualis dan ekslusif tekstualis. Corak yang pertama memahami Islam secara dialogis dengan budaya lokal bangsa Indonesia. Misalnya: Nurkholis Majid[1] dengan konsep sekularisasi Islam, Gus Dur dengan konsep pribumisasi Islam, Dawam Raharjo dkk dengan konsep pluralisme Islam. Dari kawula muda, diwarnai oleh Ulil Absar dkk. dengan JIL, dan juga diramaikan oleh kawan-kawan Jogja dengan beberapa pemikiran keislaman yang terangkum dalam Madzhab Jogja.

Corak yang kedua memahami Islam secara tekstual ekslusif berdasar makna dasar sebuah teks asasi Islam (alqur'an-sunnah) tanpa ada dialektika dengan budaya lokal. Kelompok ini diwarnai oleh Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), gerakan transnasional yang berteriak dan

[1] Sebagai pemikir neomodernis, cak Nur memberikan satu pemikiran baru dikalangan umat islam Indonesia, tentang pentingnya pemikiran islam secara kontekstual. Adapun karya yang bisa dijadikan bahan bacaan adalah, Nurkholis Majid, Islam, Doktrin Dan Peradaban: Telaah Kritis atas Masalah Keimanan, Kemanusiaan dan Kemodernan, Jakarta, Paramadina, 1992.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengusung konsep khilafah Islamiyah[2]. Disusul dengan kelahiran FPI[3] yang juga berteriak tentang tegaknya syariat Islam di Indonesia dengan percikan-percikan kekerasan bahkan kerusakan.

Beraneka ragamnya pemahaman keIslaman di Indonesia sebagaimana data di atas, menyiratkan bahwa Islam bersifat umum dan abstrak sehinggga butuh pemahaman dan kreasi manusia untuk mengkongkritkan pesan-pesan keislaman agar bisa berfungsi sebagai landasan hidup bagi manusia. Tanpa mengurangi sikap apresiatif terhadap dua corak pemikiran di atas, ditengarai bahwa sampai saat ini konsep Islam warna-warni hanya bersifat wacanis belum beroperasi pada wilayah praktis dan menyentuh lapisan problem kehidupan masyarakat. Di altar lain, wacana tersebut dapat memperparah kebingungan ma–syarakat bahkan membuat masyarakat resah dalam memahami dan menjalankan ajaran ajaran Islam. Konsep Islam kontekstual yang dirumuskan oleh pe–mikir diatas juga tidak memberikan sebuah peta atau rumusan praktis yang jelas dan mudah untuk dilakukan oleh seluruh masyarakat Indonesia. Konsep Islam kaffah atau tekstual yang diper–tahankan oleh kelompok pemikir diatas bukan malah menyelesaikan problem bangsa malah melahirkan masalah baru dengan tidak mengindahkan nilai nilai kemanusiaan bagi kelompok agama lain.

Kegelisahan Akademik

Berdasar Potret keberagamaan di atas, lahirlah ketertarikan akademik yang menunjukkan bahwa pemahaman keisla–man memiliki dua dimensi, yaitu dimensi privasi atau individual dan dimensi publik atau sosial. Kegelisahannya adalah dua dimensi tersebut dalam pertarungan wacana keislaman di Indonesia belum ada rumusan yang jelas sehingga kerap–kali terjadi pemaksaan sikap privasi keagamaan terhadap publik, dan penga–buran atau politisasi publik terhadap agama. Berpijak pada kegelisahan ter–sebut, tulisan ini ingin mencari format baru kehidupan keagamaan di indonesia yang bersifat inklusif dan menuai kedamaiaan. Format tersebut akan diwu–judkan dalam bentuk rumusan atau pan–duan praktis keberagamaan diruang publik. Guna mengawal rumusan ke–agamaan di ruang publik akan digunakan teori diskursus Jurgen Habermas yang beraksentuasi pada pola tindakan komu–nikatif dan sikap deliberative di ruang publik.

Pertanyaan mendasar yang akan dijawab dalam tulisan ini adalah bagai–mana rumusan pola interaksi keberaga–maan masyarakat Indonesia yang bersifat privasi dan publik. Tulisan ini bertujuan untuk memberikan pola pemahaman baru dalam memahami dan mengamal–kan nilai Islam diruang publik tanpa mencederai nilai kesatuan bangsa Indo–nesia. Dalam tulisan ini, masyarakat In–donesia diharapkan mampu menjalankan tugasnya sebagai warga Negara, dan menjalankan tugasnya sebagai umat beragama tanpa harus merusak tatanan atau norma yang telah berlaku dinegara

[2] Hizbut Tahrir menganggap bahwa sistem pemerintahan selain khilafah sebagai sistem yang bertentangan dengan islam. Prinsip inilah yang melatarbelakangi HTI menggelar muktamar khilafah di 31 daerah di Indonesia, di awali dari kota Kendari 05 Mei 2013 bertempat di Stadion Lakidende, dan puncaknya di Jakarta 02 Juni 2013 bertempat di Gelora Bung Karno. Informasi ini bisa diakses di http://hizbut-tahrir.or.id

[3] FPI merupakan ormas Islam yang lahir 17 Agustus 1998 di Jakarta bertujuan menegakkan amar ma'ruf nahi munkar dan mendendangkan mauidhah hasanah, berpedoman Allah tujuan kami, Muhammad SAW tauladan kami, Al-Qur'an pedoman kami, Jihad jalan hidup kami, dan sahid cita-cita kami. Ali Purnomo, *FPI disalahpahami*, Jakarta: Mediatama Indonesia, 2003. Hal. 35

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Indonesia.

Melalui panduan atau rumusan keberagamaan di ruang publik yang akan digagas dalam tulisan ini, masyarakat Indonesia khususnya kelompok agama yang memiliki prinsip dan ideologi masing-masing, mampu memposisikan dirinya sebagai umat beragama, dan sebagai warga Negara. Di altar lain, dengan adanya tulisan ini, masyarakat memiliki panduan yang jelas dalam menyebarkan pesan pesan keagamaan, dan menyebarkan pesan kebangsaan di ruang publik. Dengan demikian tidak lagi terkesan bahwa agama dipaksakan ke dalam Negara, dan Negara diintervensi oleh kepentingan kelompok agama.

Menghadirkan Kembali Pemikiran Terdahulu (*review literature*)

Tulisan ini diawali dari hasil pemba–caan terhadap beberapa teks pustaka yang merupakan tulisan terdahulu ten–tang konsep keberagamaan di Indonesia. *Pertama*, buku karya, Abdurrahman Wa–hid yang berjudul Islamku, Islam Anda, Islam Kita[4]. Dalam buku ini, Gus Dur membagi islam menjadi tiga: **Islamku**, yaitu keber-islam-an yang berlandaskan pada pengalaman pribadi perseorangan. Sebagai sebuah pengalaman, pandangan ke-islam-an seseorang tidak boleh dipak–sakan (harus disamakan) kepada orang lain. Jika itu terjadi, maka akan mengaki–batkan munculnya dislokasi pada orang lain yang pada akhirnya dapat "membunuh" keindahan dari panda–ngannya sendiri. Pada posisi inilah islam sebagai agama privasi. **Islam anda** yaitu keberislaman yang berlandaskan pada keyakinan seseorang sesuai dengan pa–radigma tertentu. Pada posisi ini, keya–kinan masyarakat Indonesia yang berco–rak multicultural menjadi pertimbangan dalam menentukan substansi. **Islam kita**, yaitu keber-islam-an yang bercita-cita un–tuk mengusung kepentingan bersama kaum Muslimin.

Model keberislaman yang terakhir inilah yang menjadi pusat perhatian atau solusi untuk menjembatani problem islamku dan islam anda. Konsep keber–islaman diatas, menurut amatan peneliti, masih baru bersifat wacanis konseptual yang menyisakan beberapa pertanyaan besar. Artinya, dalam buku tersebut Gus Dur belum mengarah pada model kebe–ragamaan secara praktis yang bisa langsung dijadikan panduan atau refe–rensi dalam menjalankan titah agama di Indonesia. Kedua, karya Aksin Wijaya, berjudul Menusantarakan Islam: Menelu–suri Jejak Pergumulan Islam yang Tak Kunjung Usai di Nusantara[5]. Buku ini hadir sebagai bentuk kegelisahan terha–dap maraknya kajian Islam Nusantara yang cenderung menyajikan potret islam nusantara hanya sebatas bangunan peristiwa peristiwa yang larut dalam gelombang sejarah masa lalu. Berpijak pada kegelisahan tersebut, buku saudara Aksin bermaksud untuk melacak jejak Islam dari aspek watak dasar internal.

Sebagaimana diakui penulisnya, buku ini sebagai pelanjut dan usaha

[4] Karya ini merupakan kumpulan tulisan Gus Dur pasca lengser. Melalui karya ini islam yang tampaknya melangit akan dibuat membumi, islam yang seakan Arabik akan diakrabkan dengan budaya masyarakat Indonesia. Pesan utama yang hendak dikatakan oleh Gus Dur adalah Islam agama yang universal, *rahmatal lill alamin*, mampu menjadi pemersatu dari cerai berai dan perpecahan. Abdurrahman Wahid, *Islamku, Islam Anda, Islam Kita*. Jakarta, 2006.

[5] Islam antroposentris transformatif merupakan konsep Islam yang menjunjung tinggi hak manusia, dengan tidak mencederai dan menafikan pesan-pesan moral keaga–maan. Untuk mengetahui secara mendalam watak dasar Islam nusantara yang bercorak lokal, baca: Aksin Wijaya, Menusantarakan Islam: Menelusuri Jejak Pergumulan Islam yang Tak Kunjung Usai di Nusantara, Yogyakarta, Nadi, 2011.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mewujudkan konsep Islam Pribumi se–bagai cita cita Gus Dur yang terus didia–logkan dengan budaya lokal. Oleh karena budaya bersifat bergerak dan dinamis, penulis buku menggas wawasan baru dalam membumikan islam pribumi be–rupa konsep Islam Antroposentris trans–formatif. Sesuai dengan amatan saya dalam membaca buku saudara aksin, konsep islam nusantara yang digagasnya masih berputar pada gagasan keberaga–maan yang bersifat teoritis belum me–nyentuh pada rumusan praktis yang bisa dijadikan formula bagi penganut agama, maupun kelompok keberagamaan dalam menjalankan titah agama. Ketiga, buku karya Taqiyuddin an Nabhani[6] yang berjudul, Mengenal Hizbut Tahrir, dan Pandangan Hidup dalam Islam. Buku ini menarik untuk dikaji lebih mendalam, karena buku inilah yang menjadi rujukan utama Hizbut Tahrir Indonesia. Dalam buku ini Taqiyuddin an Nabhani menga–jak kaum muslim untuk kembali hidup secara Islami di *Darul Islam* (negara Islam) dan dalam masyarakat Islam. Paham ini menjadikan halal-haram sebagai pusat perhatiannya dalam mengemban amanah Allah yang berada dibawah naungan *Daulah Islamiyah,* yaitu *Daulah Khilafah.* Di sisi lain Hizbut Tahrir bertujuan guna membangkitkan kembali umat Islam dengan kebangkitan yang benar melalui pola pikir yang cemerlang *(axellence).*

Kelompok ini melihat bahwa untuk merubah sistem yang berada di masya–rakat yang telah dianggapnya sebagai sistem kufur harus diawali dengan cara merubah sistem negara yaitu dengan membentuk *Daulah Islamiah.* Sistem ne–gara ini dipimpin oleh seorang khilafah yang dipilih melalui *bai'at,* karena menu–rut paham ini tidak pernah ada dalam sepanjang sejarah yang mengangkat khalifah dengan sistem "putra mahkota".

Pola berpikir tersebut secara *taken for granted* dijadikan rujukan oleh HTI dan diterapkan di bumi pertiwi. Menurut amatan penulis, rumusan penerapan ke–berislaman di Indonesia dengan konsep khilafah islamiyah terlalu *over confident* sehingga tidak relevan bahkan berten–tangan dengan dasar Negara. Dari kedua tulisan terdahulu di atas, ada dimensi yang belum tersentuh dan tidak terp–ikirkan yaitu panduan praktis keber-islaman di Indonesia dengan memberikan ruang kebebasan bagi umat beragama, dan warga Negara dalam bersuara, berprilaku di ruang publik. Selain itu unsur terbaru tulisan ini terletak pada teori yang digunakan dengan menyajikan etika diskursus Jurgen Habermas sebagai pemandu dalam merumuskan beberapa gagasan yang akan dilahirkan dalam tu–lisan ini.

Agama dalam Pergulatan Sosial

Dalam tatapan sosial, agama meru–pakan sebuah sistem yang berupa aturan yang dirancang dan dirumuskan oleh Tuhan untuk dijadikan pijakan oleh makhluk sosial. Oleh karena merupakan sistem, maka agama dibuat sesuai dengan kebutuhan manusia, bukan kebutuhan Tuhan. Dikatakan demikian, karena tu–runnya perintah Tuhan berawal dari pergulatan sosial masyarakat dalam mengarungi kehidupan.

Realitas keagamaan diatas kemudian direspon oleh para pakar sosial sehinggga melahirkan beberapa tesis tentang agama. E.B. Tylor menyebut agama sebagai ben–tuk kepercayaan terhadap wujud spiritual. Radcliffe Brown, seorang antro–polog, menyebut agama sebagai ekspresi

[6] Taqiyuddin An-Nabhani, *Mengenal Hizbut Tahrir: Partai Politik Islam Ideologis*, Bogor, Thoriqatul Izzah, 2002

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bentuk ketergantungan pada kekuatan diluar diri, atau akrab disebut sebagai kekuatan moral atau spiritual. Pernyataan tersebut, dipertegas dan diperjelas relasi sosialnya oleh sosiolog kontemporer Amerika yang bernama Yinger dengan menyebut agama sebagai sistem keper–cayaan dan peribadatan yang digunakan oleh pelbagai bangsa dalam mengatasi problem sosial[7]. Konsep tersebut diper–tegas dan diklasifikasi oleh Emile Dur–kheim, bahwa agama merupakan fakta sosial yang didalamnya terdiri dari dua dimensi yaitu dimensi profan dan sakral[8].

Sebagai bentuk perkembangan pe–ngalaman keagamaan manusia, agama bukan hanya merupakan bentuk penga–man kehidupan individu melainkan agama juga menjelma dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pernyataan ini diperkuat oleh sosiolog ternama Jean Jacques Roesseau yang dikenal dengan teori kontrak sosial. Menurutnya ada tiga jenis agama[9]: *pertama*, agama manusia yaitu agama individual yang hanya menkankan pada pemujaan tuhan yang maha mulia yang berada dalam hatinya dan kewajiban moral yang abadi tanpa harus terbayangi atau terbebani oleh kuil, altar dan ritus. *Kedua*, agama warga yaitu yaitu agama sosial yang dianut oleh masyarakat dari bangsanya. Jenis ini, perilaku keagamaan juga melibatkan unsur ritualitas, tempat ibadah yang sudah diatur oleh undang undang. *Ketiga*, agama yang tidak ada nama, namun mengandung makna yang oleh Roesseau disebut sebagai agama aneh, memberikan kepada manusia dua undang-undang, dua tanah air, memaksakan dua kewaji–ban yang bertentangan dan menghalangi mereka menjadi orang saleh dan juga warga Negara.

Ketiga jenis agama tersebut oleh Roesseau dinilai memiliki kekurangan karena ditengarai menghancurkan kesa–tuan sosial. Berangkat dari inilah, ta–waran yang diberikannya berupa agama sipil walaupun tidak jelas bentuknya. Namun yang diidamkannya adalah se–buah bentuk agama yang memberikan inspirasi kepada rakyatnya untuk mem–bela Negara sebagaimana membela agamanya. Agama yang dinginkannya harus mampu menjadi perajut perpeca–han, dan mampu mempersatukan rakyat dalam perasaan kebersamaan sosial.

Agama sipil yang ditawarkan dan di–dambakan oleh Roesseau ternyata sudah pernah dilakukan dan terjadi di masa Rasulullah yaitu tepatnya di Madinah. Setelah tiga belas tahun mengemban misi *La Ilaha Illallah* di Makkah, Nabi Muham–mad Hijrah ke kota Yatsrib yaitu sebuah

[7] Beberapa tesis tentang agama diatas menyiratkan bahwa didalam agama, terdapat sebuah perasaan manusia yang lahir sebagai wujud kekagumannya terhadap kekuatan yang tidak dimiliki dalam dirinya. Kekuatan ini yang dinamakan nilai nilai ketuhanaan. Namun kekuataan tersebut tidak bisa dirasakan oleh manusia, tatkala manusia tidak pernaha merasakan kehidupan dunia atau sosial. Dari perbedaan perasaan inilah timbuk sebuh kekaguman dan pengakuan terhadap kekuatan luar. Lihat, Sulthon Fatoni, Peradaban Islam: Desain Awal Peradaban, Konsolidasi Teologi, Konstruk Pemikiran dan Pencarian Madrasah, Jakarta, eLsas, 2007, hal. 124

[8] Konsep Durkheim tentang agama ingin menunjukkan bahwa agama merupakan kekuatan yang lahir dari kekuatan bawah yaitu seorang hamba akan pencarian jati diri. Ini berawal dari teori fakta sosial yang melihat manusia hidup dalam keterpaksaan sosial. Keterpaksaan yang dimaksud adalah kebiasaan yang dilakukan oleh individu sehingga menjadi sebuah keyakinan, bahkan membentuk sebuah tradisi kehidupan. Lebih jelas baca, KJ. Veeger, Realitas Sosial: Refleksi Filsafat Sosial atas Hubungan Individu Masyarakat dalam Cakrawala Sosiologi, Jakarta, PT Gramedia, 1993, hal. 157-159.

[9] Konsep tersebut berkaitan dengan potret relasi agama dan Negara yang pada dasarnya agama juga ikut andil dalam kehidupan beragama. Namun yang menjadi persoalan adalah bagaimana rumusan praktis atau aturan main dari penerapan nilai nilai agama dalam kehidupan bernegara dan penerapan nilai nilai Negara dalam kehidupan beragama. Lihat, Jean Jeacques Roesseau, Perihal Kontrak Sosial stau Prinsip Hukum Politik, Jakarta, Dian Rakyat, 2010, hal.127.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kota yang didirikan oleh Yatsrib ibn Amliq ibin Laudz ibn Sam ibn Nuh. Masyarakat di kota tersebut sangat be–ragam bahkan telah mengenal pluralism. Suku dominan yang menempati kota Yatsrib adalah suku Aus, Khazraj Qainuqa, Quraidlah, dan Bani Nadhir. Adapun penduduk kota itu menganut beberapa agama yaitu Islam, Yahudi dan sebagian kecil Kristen Najran. Di kota itulah nabi merintis dan menanamkan prinsip *Tamaddun* (*civilization*) yaitu pera–daban yang mengenal etika kebera–gamaan, etika kebangsaan, dan etika kemanusiaan[10].

Melalui prinsip inilah Nabi berhasil membentuk tatanan masyarakat yang *mutamaddin* yaitu yang berperadaban dan mengerti tentang peradaban. Oleh karena masyarakatnya sudah berperadaban, maka kota Yatsrib berubah menjadi kota Madinah yaitu kota yang menjunjung tinggi nilai nlai universalitas, keadilan, kebebasan, perlindungan hak manusia dan persamaan didepan hukum. Di kota Madinah ini, Nabi sangat menegakkan keadilan dan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Suatu saat ada sahabat Usamah bin Zayd lapor kepada Nabi bahwa ada pencuri dari Bani Mad'um, dan sahabat tersebut memberikan saran agar dibebaskan karena masih ada hubungan emosional. Dengan tegas Nabi menolak tawaran Usamah sembari ber–kata: *"demi Allah, andaikata putriku Fathimah yang mencuri maka aku sendiri yang akan memotongnya"*. Sikap penghar–gaan terhadap non muslim ditunjukkan oleh kemarahan Nabi terhadap sikap muslim yang membunuh Non Muslim sembari mengeluarkan pernyataan: *manqotala dzimmian faana khosmuh* (barang siapa yang membunuh orang kafir maka berhadapan dengan aku). Potret sejarah kepemimpinan inilah, yang membuat Roesseau kagum dan memuji nabi Mu–hammad SAW dengan mengatakan bah–wa Nabi Muhammad memiliki panda–ngan yang sangat sehat dan mampu membangun sistem politik dengan baik dan menata tata pemerintahan dengan prinsip keadilan dan kebersamaan[11].

Berpijak pada analisis di atas, tampak jelas bahwa agama termasuk juga Islam hadir sebagai sebuah aturan yang dipe–runtukkan untuk manusia dengan me–ngedepankan nilai keserasian dan ke–seimbangan antara wilayah umat in–dividu dan sosial, warga Negara dan umat agama sehingga agama dan Negara mampu menciptakan kedamaian, men–jadi penyejuk jiwa dan kehidupan bukan menjadi bara api yang mampu membakar semangat perlawanan, dan kekerasan.

Impian keseimbangan pola interaksi agama di ruang publik yang didambakan oleh para sosiolog termasuk juga Roes–seau, di Indonesia masih belum tampak di permukaan melainkan hanya sebatas imbauan yang bersifat teoritis dan wacanis. Bahkan wacana tersebut men–dapat respon yang kurang positif dan penolakan dari beberapa kalangan baik politisi, pemerintah, maupun kelompok keagamaan. Terlepas dari penolakan dan respon negative, penulis tetap berada dalam satu prinsip kebersamaan dalam beragama dan bernegara. Artinya beraga–ma dan bernegara dengan menggunakan etika sosial kemanusiaan. Untuk mereali–sasikan prinsip tersebut, tentunya butuh

[10] Berubahnya kota Yatsrib menjadi Madinah menunjukkan bahwa Nabi berhasil membentuk sebuah tatanan Islami dari aspek *tsaqofah wal hadharoh* yaitu budaya dan peradaban. Inilah yang akhir-akhir ini akrab disebut sebagai agama madani atau agama sipil. Lihat, Said Aqil Siroj, Tasawuf Sebagai Kritik Sosial: Mengedepankan Islam Sebagai Inspirasi Bukan Aspirasi, Jakarta, Khas, 2009, hal. 27

[11] Jean Jeacques Roesseau, Op.Cit. 2010. Hal.126

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perangkat atau kerangka sebagai sebuah landasan dan panduan praktis dalam beragama dan bernegara di ruang publik. Kerangka yang dimaksud adalah teori diskursus Habermas

Pola Keterlibatan Masyarakat di Ruang Publik: Sebuah Etika Diskursus Habermas

Sebagai generasi Madzhab Kritis, Habermas membuat terobosan baru dalam mengembangkan dan membangun teori kritis para pendahulunya melalui jalan dialog dengan menekankan pada paradigma komunitif. Paradigma komunikasi, Habermas tergambar dalam teori diskursus yang di dalamnya berisi tindakan komunikatif dan pola perayaan kebebasan masyarakat di ruang publik.

Teori diskursus dicipta oleh Habermas bukanlah usaha baru untuk menilai masyarakat modern, melainkan memediasi kehidupan manusia sebagai keseluruhan bersama menuju tujuan tunggal. Aksentuasi teori ini bukan sebuah tujuan masyarakat,melainkan sebagai sebuah cara atau prosedur mencapai tujuan. Teori ini menekankan pada praksis komunikasi dan radikalisasi prosedur komunikasi politis untuk mencapai konsensus dasar yang memperkokoh integritas masyarakat dan Negara. Dengan demikian, teori diskursus berorientasi pada prosedur komunikasi yang dirancang sebagai bentuk katalisator terhadap beberapa argumentasi masyarakat di ruang publik. Adapun prosedur komunikasi Habermas melibatkan beberapa pola tindakan yaitu tindakan komunikatif dan tindakan strategis.

Tindakan komunikatif merupakan sebuah pola komunikasi rasional yang berorientasi pada pencapaiaan konsensus. Mekanisme dari komunikasi ini adalah mencapai persetujuan secara intersubjektif. Artinya, konsensus diperoleh berdasar interaksi manusia dengan manusia yang lain dengan mengedepankan prinsip negosiasi, bukan dominasi. Tindakan strategis yaitu tindakan yang berorientasi pada keberhasilan sebagai bentuk tindakan mempengaruhi. Tindakan ini menjadikan bahasa bukan sebagai medium pemahaman melainkan sebagai sebuah alat memaksakan kehendak. Tindakan inilah yang melahirkan kekerasan karena kesepakatan diraih melalui jalur dominasi[12].

Dari dua tindakan tersebut, Habermas lebih mengapresiasi tindakan komunikatif yang terarah pada konsensus daripada tindakan strategis untuk menghasilkan mekanisme koordinasi sosial. Sebagai bentuk usaha rasional, tindakan komunikatif memiliki beberapa klaim validitas[13] sebagai dasar komunikasi. Klaim tersebut terdiri dari *pertama* klaim kebenaran yaitu sebuah argumentasi yang bersifat objektif alamiah. Artinya bisa dibuktikan secara empirik. Klaim ini dalam bahasa Habermas disebut sebagai penampilan manusia secara ekspresif. *Kedua*, klaim kejujuran yaitu sebuah ar–

[12] Melalui teori diskursus Habermas ingin mengatakan bahwa paradigma komunikasi merupakan jembatan untuk mencairkan suasana komunikasi yang kerap kali di dominasi oleh penguasa dan pemilik modal. Dengan kata lain, teori tindakan komunikatif, memposisikan manusia sebagai makhluk sosial yang berhak hidup di ruang publik tanpa adanya diskriminasi. Agar mempermudah memahami pemikiran habermas yang sangat brilian, baca. F. Budi Hardiman, Demokrasi Deliberative: Menimbang Negara Hukum dan Ruang Publik dalam Teori Diskursus Jurgen Habermas, Yogyakarta, Kanisius, 2009, hal. 24-36

[13] Klaim validitas tersebut merupakan kata kunci dalam melihat tindakan yang berbasis komunikasi. Apakah argumen yang disampaikan bersifat objektif, subjektif atau intersubjektif. Setelah komunikator dan komunikan sama mengetahui klaim tersebut maka pesan yang disampaikan akan mudah diterima karena bersifat rasional sesuai dengan jenis klaim. Lihat, ibid,. 2009, hal.36-37. Untuk lebih lengkapnya baca, Jurgen Habermas, Teori Tindakan Komunikatif: Rasio dan Rasionalisasi Masyarakat, Yogyakarta, Kreasi Wacana, 2009, hal. 22-23

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

gumen yang bersifat subjektif sesuai de–ngan apa yang dirasakan dan dipikirkan. Habermas menyebutnya sebagai bentuk ekspresif evaluative. *Ketiga*, Klaim kete–patan yaitu sebuah klaim yang bersifat intersubjektif. Artinya berdasar pada se–buah kesepakatan bersama. Habermas menyebutnya sebagai tindakan normatif.

Setelah klaim validitas tercipta dalam tindakan komunikatif, maka untuk teori diskursus juga mempertimbangkan se–buah deliberasi dalam ruang publik. Pertimbangan ini diatur oleh habermas dalam prosedur diskursus yang meliputi beberapa tahapan dan kesepakatan[14]: (a) semua subjek yang mampu berbicara dan bertindak boleh ikut dalam diskursus. (b) setiap berhak mempermasalahkan setiap pendapat. (c) peserta dipersilahkan untuk mengungkapkan sikap kepentingan, dan kebutuhannya. (d) tak seorang pembicara pun boleh dihalangi untuk melaksanakan haknya yang sudah ditentukan dalam poin a,b,c. Beberapa prosedur tersebut dapat dirampingkan ke dalam satu per–nyataan bahwa diskursus harus bersifat inklusif, egaliter, dan bebas dominasi.

Melalui prosedur di atas tampak jelas bahwa komunikasi yang pada awalnya bersifat individu harus dapat diakui di ruang publik. Disinilah habermas mulai membincang tentang ruang publik. Me–nurutnya ruang publik merupakan forum atau arena mediasi antara masyarakat dan Negara, rakyat dan pemerintah. Di ruang inilah masyarakat bisa melakukan kritik terhadap Negara, dan pemerintah bisa juga melakukan koreksi dan teguran rasional pada rakyat. Dengan demikian ruang publik ini bersifat independen tanpa ada kekuatan atau kekuasaan yang mendominasi. Karakter atau prinsip uta–ma dalam ruang publik tetap mengacu pada tindakan komunikatif rasional dan prosedur diskursus.

Dalam konteks ini, Habermas ter–nyata juga berbicara tentang peran agama di ruang publik. Menurutnya kita seka–rang berada dalam masyarakat pasca sekular, di mana warga beriman memiliki hak komunikasi yang sama dengan warga sekular. Sebagai bahan acuan da–lam memposisikan agama di ruang pub–lik, Habermas membuat batasan normatif kepada kelompok agama, kelompok se–kular, Negara dan mayoritas agama.

Pertama, menuntut penerjemahan kontribusi kelompok agama dari bahasa *religious particular* ke dalam bahasa yang dapat diterima oleh publik. Dalam kon–teks ini Habermas menyebut pentingnya sikap epistemis para warga *religious* un–tuk memungkinkan deliberasi publik. Artinya, bukan mendialogkan isi doktrin *religious* ekslusif, melainkan mengambil isi rasional inklusif alam iman yang bersentuhan dengan persoalan keadilan secara universal. *Kedua*, tuntutan yang sama ditujukan pada warga sekular agar dapat berempati dan menghargai perbe–daan-perbedaan di ruang publik. *Ketiga*, sikap Negara dalam deliberasi harus se–bagai neraca yang seimbang. Artinya Negara tidak boleh berpihak pada kelom–pok mana pun, dan tidak boleh memba–tasi kebebasan warga Negara, umat agama dalam berkomunikasi dengan khalayak di ruang publik. *Keempat*, kelompok mayoritas dalam demokrasi ti–dak boleh mengabaikan atau membung–kam potensi kebenaran argumentasi yang berasal dari pihak minoritas.

Dari keempat batas normative di atas, Habermas secara implisit ingin memfungsikan semua elemen sosial yang terdiri dari umat agama, warga Negara, pemerintah, tokoh agama, tokoh sosial

[14] F. Budi Hardiman, *ibid*,. 2009, hal.48

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan segala elemen yang terlibat dalam dialog publik. Dengan kata lain, manusia berhak bebas dalam publik, namun kebebasan tersebut harus dilakukan dengan etika diskursus. Umat agama manapun berhak atau bebas berekspresi di ruang publik dengan tidak menga–baikan prinsip dan prosedur atau norma norma komunikasi. Sebaliknya sebagai warga Negara berhak menjalankan kewa–jibannya tanpa harus merusak nilai nilai keagamaan.

Islam Komunikatif Berwajah Indonesia: Sebuah Panduan Kebaragamaan

Berdasar pada kerangka teori diatas, dapat disederhanakan bahwa teori dis–kursus Habermas bermuara pada ke–kuatan komunikasi rasional yang komu–nikatif dengan melibatkan relasi antar umat beragama dengan warga Negara. Artinya, sebagai umat beragama mereka bisa menjalankan pesan keagamaannya tanpa meninggalkan bahkan menggang–gu kewajiban sebagai warga Negara.

diri dari beberapa agama, maka teori tersebut sangat relevan. Penulis mencoba meramu ulang teori diskursus Habermas ke dalam realitas keberagamaan Indo–nesia yang berupa skema komunikasi.

Skema di bawah ini menggambarkan realitas keIndonesiaan yang terdiri sistem Negara dan sistem agama yang beraneka ragam atau sangat plural. Dalam konteks Negara ditunjukkan dengan adanya pluralitas etnik ras dan budaya. Dalam agama ditunjukkan dengan adanya bermacam macam agama (Islam, Kris–ten/Protestan/Katolik, Budha, Hindu, ali–ran kepercayaan). Sebagai warga Negara dan umat beragama tentunya memilki aktivitas yang bebeda atau Habermas menyebutnya dunia kehidupan (*laben–swelt*). Aktifitas tersebut diberikan kebe–basan atau jaminan ketika memasuki ruang publik. Jaminan yang dimaksud adalah diakui, diterima, dan direspon sesuai dengan aturan atau norma yang telah ada.

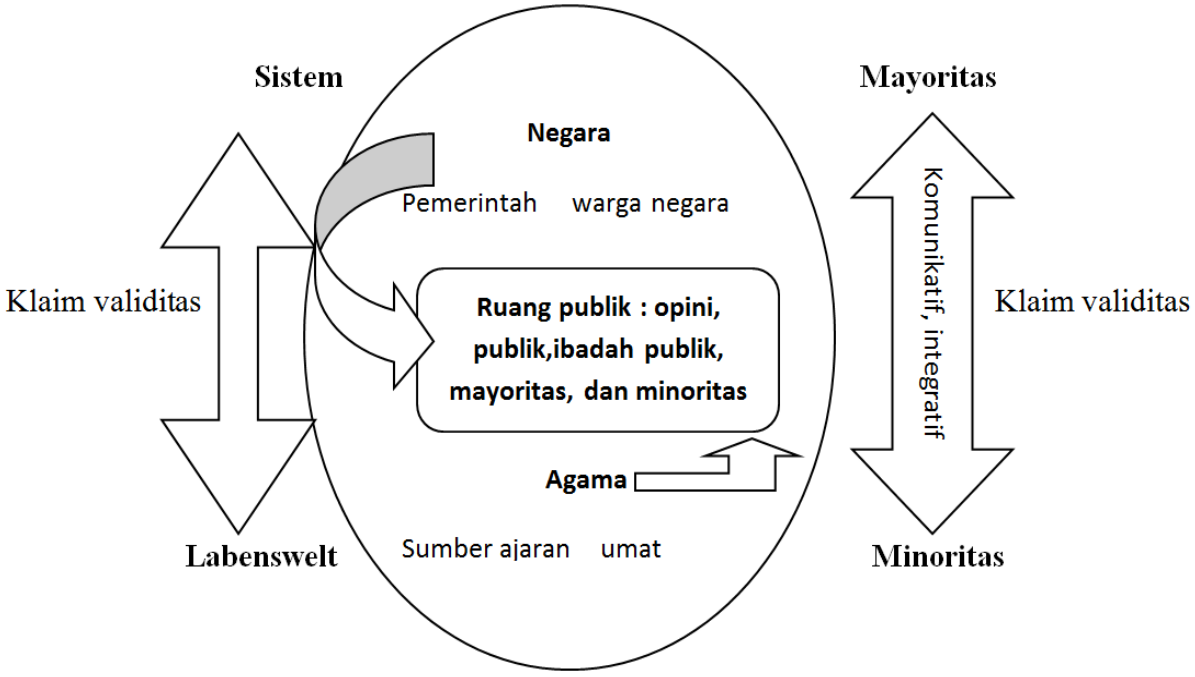

Ketika diterapkan dalam konteks keberagamaan Indonesia yang plural ter–

Sebagai warga Negara, bangsa Indo–nesia memiliki kewajiban untuk men–

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

jalankan fungsi dan tugasnya yaitu mentaati aturan Negara, mengkontrol dan menjaga stabilitas Negara. Pada po–sisi inilah rakyat menjadi satu kekuatan yang tidak bisa dikalahkan dan dilemah–kan dalam memajukan sebuah Negara. Dikatakan demikian karena, diruang publik perbedaan ras etnik, budaya tidak dipermasalahkan dan diberikan kebeba–san bersuara satu tujuan yaitu Negara Indonesia. Sebagai umat beragama, ma–syarakat Indonesia memiliki kewajiban untuk menjalankan titah agamanya sesuai dengan keyakinan dan keper–cayaan yang dianutnya.

Oleh karena beraneka agama, maka diberlakukan pemetaan internal antara wilayah individu, dan sosial. Pemetaan yang dimaksud terkait dengan aplikasi keyakinan yang berupa pelaksanaan aja–ran agama atau ibadah Ritual. Tindakan yang mengarah pada wilayah privasi agama diharapkan tidak diperdebatkan apalagi dipermasalahkan karena masing-masing agama memiliki rahasia dan nilai metafisik yang berbeda. Ketika perbedaan ini dipaksakan dengan diperdebatkan maka akan terjadi perbedaan yang mengarah pada konflik agama apalagi perdebatan tersebut dipolitisasi secara ideologis. Yang ditekankan dalam rumu–san ini adalah umat beragama sama berbicara tentang keselamatan hidup para umat dan warga dengan mendialogkan persoalan persoalan kemanusiaan guna mencapai tujuan prioritas yaitu kemas–lahatan manusia.

Sesuai dengan realitas keagamaan di Indonesia, ada agama mayoritas dan aga–ma minoritas. Artinya diukur dari jumlah pemeluknya, Islam sebagai agama mayo–ritas bangsa Indonesia. Walaupun Islam sebagai agama mayoritas, nilai-nilai tin–dakan komunikatif *integrative* harus dila–kukan tanpa adanya diskriminasi terha–dap agama minoritas. Agama mayoritas berhak berpendapat dan menyebarkan pesan keagamaannya, dan agama mino–ritas juga berhak menyebarkan pesan moralitasnya di ruang publik. Kendati demikian, teori diskursus memilki lan–dasan atau aturan main dalam tindakan komunikasi rasional. Aturan yang di–maksud adalah klaim validitas yang terdiri dari klaim kebenaran yang bersifat objektif, klaim kejujuran yang bersifat subjektif, dan klaim ketepatan yang bersifat *normative intersubjectif*. Tiga klaim inilah yang mampu memediasi dialog publik, dan melahirkan pesan-pesan uta–ma untuk publik.

Karakter yang khas dalam rumusan di atas adalah warga Negara berhak menyampaikan pesan pesan Negara dan juga berhak menyampaikan pesan pesan agama secara negosiatif komunikatif. Umat beragama juga berhak menjalankan pesan pesan agama tanpa menegasikan kewajibannya sebagai warga Negara. Selain itu umat beragama diperbolehkan memasukkan pesan-pesan agama ke dalam sistem Negara dengan catatan tidak merusak atau merubah tatanan dan landasan sebuah Negara. Dalam kondisi dan ruang publik inilah warga Indonesia bertemu menjadi satu bangsa Indonesia, dan umat beragama bertemu membentuk kekuatan agama yang berpihak pada publik, Negara, dan kemanusiaan.

Guna meperkuat keyakinan kita tentang tindakan komunikatif yang lan–dasan klaim validitas, maka dalam tulisan ini akan disajikan beberapa model dialog atau komunikasi agama yang diru–muskan oleh Paul Knitter[15].

[15] Mega Hidayati, Jurang di Antara Kita: tentang Keterbatasan Manusia dan Problem Dialog dalam Masyarakat Multicultural, Yogyakarta, Kanisius, 2008, hal. 106-128

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pertama, model penggantian yaitu bentuk komunikasi yang menekankan pada satu kekuatan tunggal yaitu agama yang dianutnya. Dalam konteks ini, ber–laku klaim kejujuran yang bersifat subjektif. Umat Islam berhak dan boleh mengatakan bahwa agama yang benar adalah Islam, Kristen juga berhak mebenarkan agamanya, Hindu, Budha juga memiliki hak untuk membela dan meyakini kebenaran agamanya. Kendati pun demikian, tidak boleh ada klaim kesalahan yang ditujukan pada agama lain.

Kedua, model pemenuhan yaitu ber–orientasi pada keseimbangan antar uni–versalitas dan partikularitas kecintaan pada Tuhan. Konsep ini membuka pintu untuk melakukan dialog atau komunikasi dengan agama lain, guna mencari kebe–naran yang juga ada dalam agama lain.

Ketiga, model mutualitas yaitu mene–kankan pada cinta dan kehadiran univer–salitas tuhan dalam agama lain. Model ini meyakini bahwa tuhan memiliki ajaran yang bersifat universal yang ada dalam ssetiap agama. Oleh karena model ini membuka keterbukaan dialog antar agama untuk mencari nilai universalitas tuhan.

Keempat, model penerimaan yaitu menekankan pada penerimaan atas keberagaman tradisi religious. Artinya, agama yang satu menerima tradisi agama yang lain. Islam menerima tradisi agama Kristen, Kristen menerima tradisi Islam. Yang dimaksud menerima dalam konteks ini tidak harus mengikuti melainkan mengakui dan menghargai keberadaan sebagai sebuah tradisi agama di ruang publik.

Keempat model Knitter tersebut, menggambarkan bahwa dialog atau ko–munikasi sangat diprioritaskan guna mencari sebuah nilai universal agama yang ada dalam setiap agama. Nilai universal tersebut adalah kemaslahatan, keselamatan dan kebahagiaan manusia di hadapan Tuhan, Negara, dan bangsa.

Analisis di atas, tampak jelas bahwa paradigma komunikasi dan ruang publik dengan klaim validitas mampu menjem–batani cara penyampaian pesan-pesan keagamaan dan pesan kemanusiaan tanpa harus mengecewakan atau men–deskrinasikan penerima pesan. Selain itu ruang publik menjadi muara atau lautan tempat berkumpulnya beberapa penda–pat, kepentingan, dan kekuasaan menjadi satu warna yaitu warga Negara dan umat agama.

Dengan demikian, Islam berwajah Indonesia adalah penerapan nilai Islam yang mampu memberikan keselamatan, ketenangan dan pencerahan bagi umat, agama lain serta memberikan manfaat bagi Negara. Islam Indonesia tetap kritis terhadap segala bentuk kebijakan Negara dengan tidak mencederai nilai dasar Ne–gara. Islam Indonesia mampu mebedakan dan memrankan dua peran yang berbeda yaitu umat beragama dan warga Negara. Islam Indonesia memiliki kewajiban un–tuk menjaga dan mengawal Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai bentuk menjalankan amanah atas warisan para pejuang kemerdekaan. Islam Indo–nesia tidak memposisikan agama lain diruang publik sebagai agama minoritas melainkan sebagai mitra kerja dalam merealisasikan nilai universalitas tuhan yang berupa keselamatan manusia.

Tesis di atas senada dengan sema–ngat multikulturalisme Ibnu Rusdy yang berupa kiat atau strategi dalam mema–hami agama, di antaranya: *pertama*, semangat toleransi terhadap orang yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berbeda pendapat, berbeda budaya, dan paham keagamaan. Semangat ini mendo–rong kita untuk menjadi muslim progresif dengan melakukan semangat ijtihad, serta mengakui keanekargaman sosial, agama dan budaya sebagai produk ijtihad dengan kata lain "*berikan kepada Tuhan apa yang menjadi kehendak Tuhan, dan berikan kepada kaisar apa yang menjadi kehendak kaisar".*

Kedua, tradisi kritik, dan kebebasan kritik, Ibnu Rusdy memperkenalkan pen–tingnya filsafat sebagai alat memahami Agama, karena menurut beliau tanpa filsafat manusia akan mengalami kele–suan berpikir dan keloyoan tradisi kritik. Pernyataan ini mengandung makna bahwa dalam memahami dan menyikapi segala sesuatu diperlukan sikap kritis terhadap orang lain agar tidak terpe–rangkap oleh kepentingan ideologi ke–lompok. Untuk menciptakan sikap kritis diperlukan tradisi berpikir dalam me–nangkap dan memahami kenyataan. Pentingnya tradisi berpikir ini dideklа–rasikan pertama kali oleh Rene' Descartes dengan diktumnya yang terkenal *"cogito ergosum"* saya berpikir maka saya ada.

Secara kronologis diktum tersebut berawal dari sebuah mimpinya. Mimpi itu berupa terjangan simbol kekuatan dahsyat yang jauh melampaui kesanggu–pannya untuk melawan, hingga harus segera memutuskan mencari pilihan jalan hidup. Sebuah puisi dengan awal kalimat "*hidup apa yang akan kau ikuti*" diang–gapnya sebagai isyarat bahwa ia mesti memburu ilmu pengetahuan. Dengan kata lain bahwa diktum di atas meru–pakan jawaban dari ketiga mimpi yang dialami Descartes[16].

Ketiga, kritis atas kekuasaan, sikap inilah yang mendarah daging pada diri Ibnu Rusdy yaitu selalu menjadi kontrol terhadap kebijakan penguasa. Dalam konteks ini, kritik kekuasaan bukan ber–arti kita menolak terhadap Negara, melainkan memberikan kontribusi yang mencerahkan berupa pemikiran dan ke–terlibatan langsung dalam menjalankan tugas warga Negara.

Dengan adanya panduan komunikasi praktis yang diinspirasi oleh teori dis–kursus Habermas, minimal warga Negara Indonesia dan umat beragama khususnya Islam mengerti tentang beberapa prinsip dalam dunia kehidupan: *pertama*, prinsip *Syura* yaitu sebuah musyawarah atau konsensus yang didapat melalui usaha negosiasi dan komunikasi di ruang pub–lik. Dalam termenologi politik prinsip ini disebut sebagai demokrasi.

Kedua, prinsip persamaan didepan hukum (*al-musyawah amamal qonun*). Prin–sip ini tidak melihat kelas dan stratifikasi sosial, agama, ras, etnik dan budaya me–lainkan melihat apa yang dilakukan dan didasarkan pada hukum yang berlaku. Pejabat yang bersalah diadili di hadapan hukum, begitu juga pada rakyat yang membuat kesalahan harus diadili sesuai ketentuan hukum.

Ketiga, prinsip menjunjung tinggi hak asasi manusia (*al muhafadlah ala karomatil insan*). Hak asasi manusia sebagai warga Negara dijunjung tinggi, hak asasi sebagai umat beragama dijunjung tinggi dan dimuliakan. Realitas yang menimpa bangsa kita adalah penghinaan hak asasi manusia dengan bentuk penindasan, dan kekerasan.

Keempat, kebebasan dan kemerde–kaan beraqidah, berpikir, dan berargu–men (*hurriyah al aqidah, wal fikr wal qoul*). Di sinilah komunikasi berfungi dan ruang publik menjadi media bertemunya aqi–

[16] lihat, Ren'e Descartes, *diskursus dan metode*, *terj*, Yogyakarta, Ircisod, 2003, hal:6-7.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dah, pemikiran dan pendapat yang ber–aneka ragam.

Kelima, prinsip kontroling dari rakyat terhadap pemerintah dan akuntabilitas pemerintah terhadap rakyat (*roqobatul ummah wamasuliyatul hakim*). Peran ma–syarakat sebagai *agent of control, and change* betul betul diwujudkan. Melalui cara ini pemerintah selalu diawasi oleh rakyat dan rakyat merasa diperankan oleh pemerintah serta terjadi wujud kebe–ranian kejujuran sebagai bentuk pertang–gungjawaban pemerintah pada rakyat.

Dengan demikian, Islam komunikatif bisa menjelma menjadi penyelamat de–ngan dua identitas yaitu warga Negara dan umat beragama. Indonesia sebagai Negara akan memiliki kekuatan dan aman karena warga negaranya merasa memilikinya. Agama-agama di Indonesia akan membawa perdamaian, khususnya Islam sebagai agama mayoritas mampu hidup berdampingan dengan agama-agama lain dan berkomunikasi untuk menciptakan keharmonisan.

Penutup

Pada prinsipnya bentuk agama pub–lik yang dalam temuan tulisan ini disebut sebagai Islam komunikatif berwajah In–donesia menampilkan wajah Islam yang damai, rasional, komunikatif negosiatif, dan berhubungan dengan Negara, agama dan bentuk kehidupan yang lain, serta memiliki landasan yang jelas dalam menyampaikan pesan pesan agama di hadapan publik. []

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

An-Nabhani, Taqiyuddin, *Mengenal Hizbut Tahrir: Partai Politik Islam Ideologis*, Bogor, Thoriqatul Izzah, 2002.

Fatoni, Sulthon, *Peradaban Islam: Desain Awal Peradaban, Konsolidasi Teologi, Konstruk Pemikiran dan Pencarian Madrasah,* Jakarta, eLsas, 2007.

Habermas, Jurgen, *Teori Tindakan Komunikatif: Rasio Dan Rasionalisasi Masyarakat (I),* Yogyakarta, Kreasi Wacana, 2009.

…, *Teori Tindakan Komunikatif: Kritik atas Rasio Fungsionalis (II),* Yogyakarta, Kreasi Wacana, 2009.

…, Ruang Publik: Sebuah Kajian tentang Masyarakat Borjuis, Yogyakarta, Kreasi Wacana, 2010.

Hardiman, F. Budi, *Demokrasi Deliberative: Menimbang Negara Hukum dan Ruang Publik dalam Teori Diskursus Jurgen Habermas,* Yogyakarta, Kanisius, 2009.

Jean Jeacques Roesseau, *Perihal Kontrak Sosial atau Prinsip Hukum Politik,* Jakarta, Dian Rakyat, 2010.

Nur, Achmad, *Dibalik Dakwah Kontemporer*, Yogyakarta Bassan Publishing, 2010.

Veeger, KJ, *Realitas Sosial: Refleksi Filsafat Sosial atas Hubungan Individu Masyarakat dalam Cakrawala Sosiologi*, Jakarta, PT Gramedia, 1993.

Wahid, Abdurrahman, *Islamku, Islam Anda, Islam Kita.* Jakarta, 2006.

Wijaya Aksin, *Menusantarakan Islam: Menelusuri Jejak Pergumulan Islam yang Tak Kunjung Usai di Nusantara*, Yogyakarta, Nadi, 2011.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id